

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ROB  
(Studi Kasus Kota Tegal)**

**Oleh :  
(Soni Hazam Ardiansyah<sup>1</sup>, Drs. Edi Santosa,S.U<sup>2</sup>, Dra. Wiwik Widayanti<sup>3</sup>)**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Secara topografis, kota Tegal terletak di daerah dataran rendah di wilayah pesisir pantai utara Laut Jawa. Kondisi topografi ini yang menyebabkan wilayah kota Tegal memiliki potensi kerentanan bencana yang disebabkan oleh air laut cukup tinggi. Kota ini setiap tahun dihadapkan pada persoalan banjir rob. Menurut UU nomor 32 tahun 2009 Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota. Pemerintah kota tegal mempunyai tugas untuk menetapkan kebijakan yang tepat dalam rangka upaya penanggulangan rob. Paradigma pembangunan yang secara perlahan-lahan telah bergeser pada upaya meningkatkan peranserta masyarakat dalam berbagai tahapan kegiatan pembangunan. Prinsip dari pelaksanaan program tersebut adalah menempatkan masyarakat selain sebagai obyek pembangunan adalah juga sebagai subyek atau pelaku pembangunan yang diharapkan dapat melanjutkan/mengembangkan program pembangunan tersebut serta dapat mengatasi masalahnya sendiri terutama dalam peningkatan kualitas lingkungan permukimannya. Dari hal tersebut perlu diketahui bagaimana partisipasi masyarakat kota tegal dalam penanggulangan rob.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode gabungan kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods design*). *Mixed methods design* adalah suatu prosedur mengumpulkan data, menganalisis dan "mixing" kedua metode kualitatif dan kuantitatif dalam suatu penelitian tunggal untuk memahami masalah penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan model pengambilan sampel secara bertujuan (*purposive sampling*). Pengertian purposive sampling adalah sampel yang dipilih cermat yang dianggap layak atau representatif dalam memberikan informasi mengenai permasalahan penelitian.

Strategi implementasi yang digunakan Pemerintah Kota Tegal dalam penanggulangan rob adalah dengan melibatkan segenap instansi dan elemen terkait masalah rob, yaitu dengan melibatkan SKPD, perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak rob. Keterlibatan segenap unsur dan elemen masyarakat Kota Tegal tersebut meliputi; tahap perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan evaluasi. Sebelum dilakukan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FIFIP Universitas Diponegoro Angkatan 2009

<sup>2</sup> Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FIFIP Universitas Diponegoro

<sup>3</sup> Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FIFIP Universitas Diponegoro

penetapan kebijakan penanggulangan rob, kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang dijadikan sasaran program disosialisasikan terlebih dahulu mengenai rencana tahapan-tahapan yang akan dilakukan Pemerintah Kota Tegal terhadap kawasan terkena dampak rob, dengan harapan di samping masyarakat menjadi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif, juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam tahap implementasi nantinya.

Secara umum tingkat partisipasi responden dalam proses penanggulangan rob selama ini tergolong menengah ke atas. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, penetapan dan implementasi kebijakan Rob oleh pemerintah Kota Tegal. Hal ini juga disebabkan adanya usaha pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal.

Kata kunci: *Analisis Kebijakan, Partisipasi Masyarakat*

## ABSTRACT

Topographically, Tegal city located in low-lying areas in the northern coastal areas of Java Sea. This topographic conditions that led to the city of Tegal has the potential vulnerability of disaster caused by sea water is quite high. The city is faced with the question every year tidal flood. According to Law No. 32 of 2009 in the protection and management of environmental, district / city government duty and authority to determine level of district / city. Tegals city government has a duty to establish appropriate policies in order to rob the response. Development paradigm has gradually shifted its efforts on increasing public participation in various phases of development activities. Principles of the implementation of the program is to put the public other than as objects of development is also a subject or perpetrator of development that is expected to continue / expand the development program and can solve their own problems, especially in improving the quality of settlement environment. Of it is to know how public participation in the prevention rob tegal city.

In this study the researchers used a combination of qualitative and quantitative methods (mixed methods design). Mixed methods design is a procedure to collect data, analyze and "mixing" both qualitative and quantitative methods in a single research study to understand the problem. This research will use models aim sampling (purposive sampling). Understanding of purposive sampling is carefully selected samples were deemed worthy or representatatif in providing information on research problems.

Implementation strategies used by the Government in response to rob Tegal is by involving all relevant agencies and elements rob problem, namely by engaging on education, the local, non-governmental organizations, communities and society tokoh affected rob. The involvement of all elements and elements that comprise the city of Tegal; stages of planning, organizing, implementation and evaluation. Prior to the establishment of management policies rob, to the community, especially people who were targeted socialized programs in advance of planned steps to be performed Tegal City Government to the areas affected by flooding, in addition to the community in hopes to have a comprehensive knowledge and understanding, as well can actively participate in the later stages implmentasi.

In general, the respondents' participation in the management process is classified as long rob upper middle. Community actively participate in the planning, establishment and implementation of government policies by Rob Tegal. It is also due to the efforts of community engagement undertaken by the City of Tegal.

Keywords: *Policy Analysis , Public Participation*

## **A. PENDAHULUAN**

Salah satu tekanan yang akhir-akhir ini mengancam keberlangsungan wilayah pesisir di seluruh belahan dunia adalah adanya kenaikan muka air laut. Secara umum, kenaikan muka air laut merupakan dampak dari pemanasan global (*global warming*) yang melanda seluruh belahan bumi ini. Berdasarkan laporan IPCC (*International Panel On Climate Change*) bahwa rata - rata suhu permukaan global meningkat 0,3 - 0,6 0C sejak akhir abad 19 dan sampai tahun 2100 suhu bumi diperkirakan akan naik sekitar 1,4 - 5,80C . Naiknya suhu permukaan global menyebabkan mencairnya es di kutub utara dan selatan bumi sehingga terjadilah kenaikan muka laut (*Sea Level Rise*). Diperkirakan dari tahun 1999-2100 mendatang kenaikan muka air laut sekitar 1,4-5,8 m.

Secara topografis, kota Tegal terletak di daerah dataran rendah di wilayah pesisir pantai utara Laut Jawa. Kondisi topografi ini yang menyebabkan wilayah kota Tegal memiliki potensi kerentanan bencana yang disebabkan oleh air laut cukup tinggi. Kota ini setiap tahun dihadapkan pada persoalan banjir rob dan kekeringan. Khusus saat musim hujan rob menjadi langganan di wilayah-wilayah tertentu. Daerah-daerah yang terkena rob diantaranya Kelurahan Tegal Sari, Muarareja, Panggung, dan Kelurahan Mintaragen. Ketinggian air bisa mencapai 50 cm.

Banjir Rob ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sekitar yang terkena Rob maupun masyarakat luar yang akan menuju daerah tersebut. Genangan di kawasan rob mempunyai ketinggian yang berbeda, tergantung pada kondisi alami dan

fisik kawasan. Pada umumnya, genangan rob semakin tinggi di kawasan dengan kondisi topografi lebih rendah, lebih dekat dengan wilayah pantai, atau kondisi sungai dan drainase tidak mampu menampung dan mengalirkan air dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan efektifitas penanganan bencana di wilayah kota Tegal maka diperlukan prosedur tetap tata cara pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana secara terpadu antara dinas/instansi terkait dimana penanganan bencana khususnya Rob memerlukan koordinasi lintas sektoral yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung sehingga menimbulkan sense of belonging sebagai bentuk kepedulian dari semua pihak (masyarakat, pemerintah dan sektor swasta).

Masyarakat juga mempunyai peran untuk berpartisipasi aktif dalam rangka upaya penggulungan rob. Partisipasi masyarakat mencakup peran serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaan manfaat pembangunan dengan mempertimbangkan otonomi dan kemandirian masyarakat. Partisipasi dalam arti luasnya mencakup pula *involvement* dan *empowerment*. Partisipasi berentang mulai dari pembuatan kebijakan, implementasinya sampai dengan kendali warga negara terhadapnya.<sup>4</sup> Partisipasi masyarakat untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut diatas menjadikan penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat Kota Tegal dalam penanggulangan Rob.

## **B. PEMBAHASAN**

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode

---

penelitian survai. Penelitian survai yaitu, penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variable yang timbul di masyarakat, yang menjadi obyek penelitian ini, berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variable tersebut.

Rob di Kota Tegal merupakan fenomena yang telah terjadi cukup lama. Dalam kaitan tentang rentang waktu kapan mulai terjadinya rob di Kota Tegal. Ketinggian Rob di Kota Tegal dipengaruhi oleh fluktuasi cuaca seperti misalnya banjir 5 (lima) tahunan dan ada banjir 10 (sepuluh) tahunan. bahwa kerugian dampak rob bagi masyarakat adalah rumah, tambak dan halaman rumah mereka. Masyarakat yang terkena rob terkadang dirugikan beberapa kali, contohnya adalah ketika rumah mereka sudah ditinggikan agar tidak tergenangi rob, namun ternyata beberapa waktu kemudian rumah tersebut terkena genangan lagi akibat dari ketinggian rob yang semakin meningkat akibat fluktuasi tersebut.

Dalam usaha penanggulangan Rob Pemerintah Kota Tegal dalam jangka pendek melakukan tindakan dengan melihat kondisi terkini di daerah terdampak. Pemerintah melakukan tindakan segera terhadap wilayah-wilayah yang kondisinya buruk. Tidak ada perencanaan secara mendalam untuk jangka pendek, hanya ada tindakan segera sesuai dengan keadaan di lapangan. Tindakan jangka pendek sebagai contoh adalah pembuatan talud., tanggul laut, peninggian jalan dan pembuatan pintu-pintu air. Sedangkan untuk jangka panjang pemerintah melakukannya dengan membentuk sistem, ada kawasan yang penanggulangannya harus secara sistemik. Hal itu dilakukan secara komprehensif. Sebagai contoh adalah pembangunan kolam retensi

dan *polder*, yang mahal itu merupakan tindakan jangka panjang Pemerintah Kota Tegal.

Penggunaan alokasi anggaran Pemerintah Kota Tegal dalam penanggulangan Rob seperti pembuatan talud, peninggian jalan, pintu-pintu air dianggarkan dari APBD 2. Setiap tahun dianggarkan 4-12 Milyar. Jangka panjang seperti pembangunan *polder* dan kolam retensi, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena biaya yang cukup besar antara 13-64 milyar. Bantuan khusus dari pemerintah pusat akan mulai dicairkan pada tahun 2014 untuk pembangunan kolam retensi di Mintaragen.

Program penanggulangan rob di Kota Tegal dijelaskan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Teknis dan Pembiayaan

Secara teknis Pemerintah Kota Tegal telah merencanakan pembangunan fisik secara bertahap. Hal ini dilakukan karena dalam pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar. Pembangunan dilakukan secara bertahap dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam jangka pendek pemerintah melakukan penataan drainase dengan biaya Rp. 17.181.000.000. penataan drainase ini dilakukan pada tahap 1 yaitu tahun 2009-2014 dengan pembiayaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kota Tegal. Selain itu dalam jangka pendek pemerintah melakukan peninggian jalan dengan biaya Rp. 18.800.000.000. Peninggian Jalan ini dilakukan pada tahap 1 yaitu tahun 2009-2014 dengan pembiayaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kota Tegal.

Untuk jangka menengah pemerintah membuat tanggul sungai dengan biaya Rp 41.230.000.000. Pembuatan tanggul sungai ini dilakukan pada tahap I yaitu tahun 2009-2014 dan tahap II yaitu tahun 2014-2019. Pada tahap I biaya dibutuhkan adalah Rp.20.615.000.000 dan pada tahap II membutuhkan biaya Rp.20.615.000.000 dengan

pembiayaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kota Tegal. Selain itu Untuk jangka menengah pemerintah juga membangun tanggul laut dengan biaya Rp 83.200.000.000. Pembuatan tanggul laut ini melalui 3 tahapan yaitu pada tahap I, II dan III dengan biaya dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kota Tegal.

Dalam jangka panjang pemerintah kota Tegal akan membangun bendung karet. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan ini sebesar Rp.45.000.000.000. Pembangunan bendung karet ini dilakukan pada tahap III dan IV yaitu pada tahun 2020-2030 dengan pembiayaannya direncanakan diambil dari APBN.

## 2. Sosial

Dalam aspek sosial, Pemerintah Kota Tegal berupaya untuk melakukan sosialisasi memberikan pemahaman tentang apa yang akan dilakukan pemerintah di kawasan mereka dalam rangka penanggulangan rob. Sosialisasi dilakukan pemerintah melalui pemerintah kelurahan. Sosialisasi diberikan manakala pemerintah akan melaksanakan pembangunan di kawasan tersebut. Selain untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan yang akan dilaksanakan, sosialisasi juga berfungsi untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpendapat tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal dalam rangka penanggulangan Rob.

Partisipasi masyarakat daerah rob Kota Tegal selama ini pada proses perencanaan pembangunan serta aplikasi di lapangan. Pada proses perencanaan, masyarakat ikut bermusyawarah dengan Pemerintah Kota Tegal dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG). Selain perencanaan, masyarakat juga berpartisipasi dalam mengaplikasikan pembangunan pintu-pintu air yang sudah dibangun oleh pemerintah.

Dilibatkannya masyarakat terkena dampak rob dalam penanggulangan rob di Kota Tegal, tiada lain agar capaian yang dihasilkan dari program penanggulangan rob dapat maksimal, yang sekaligus sebagai bukti bahwa Pemerintah Kota Tegal telah berupaya untuk menerima secara terbuka setiap aspirasi yang berkembang di masyarakat.

### 3. Aspek Lingkungan

Dalam aspek lingkungan pemerintah berupaya untuk menahan abrasi yang lebih parah dengan menanam mangrove di pesisir pantai Kota Tegal. Pemeliharaan mangrove ini melibatkan LSM lingkungan yang peduli akan lingkungan hidup. Namun sebenarnya fungsi mangrove tidak secara langsung untuk menanggulangi Rob. Namun untuk menahan adanya abrasi di daerah Pantai. Selain itu Kantor Lingkungan Hidup kota Tegal juga berupaya untuk mengajak masyarakat untuk hidup disiplin dan sehat untuk ikut berpartisipasi melalui kedisiplinan membuang sampah tidak sembarang karena akan berakibat pada tersumbatnya saluran air.

### 4. Aspek Hukum

Dalam masalah penanggulangan rob di Kota Tegal Pemerintah Kota Tegal belum mempunyai regulasi yang berupa Peraturan Daerah. Pemerintah Kota Tegal belum mempunyai Peraturan Daerah yang khusus mengenai penanggulangan rob. Pemerintah Kota Tegal tidak mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur tentang rob. Dalam implementasinya pemerintah menggunakan dokumen perencanaan sebagai output dari perencanaan yang dilakukan dengan para *stakeholder*.

### 5. Aspek Kelembagaan

Dalam penanggulangan Rob di Kota Tegal secara kelembagaan pemerintah Kota Tegal belum mempunyai satu lembaga khusus yang dibentuk untuk usaha

penanggulangan Rob. Sinergi antar SKPD hanya sebatas menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan kebutuhan dalam penanggulangan Rob.

Sebagai contoh BP2T berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan lahan jika ada lahan masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka penanggulangan rob ini. PU bertugas secara teknis dalam pembangunan infrastruktur. Dislatan, bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada petani dan nelayan yang terkena dampak penanggulangan rob

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakat perlu melibatkan peran *stakeholder*. Begitu pula dengan penanggulangan rob di Kota Tegal, partisipasi *stakeholder* sangat berpengaruh pada pencapaian hasil usaha penanggulangan rob tersebut. peran masyarakat sangatlah penting, baik dari sisi infrastruktur maupun perilaku. Masyarakat harus menyesuaikan bangunan rumahnya agar ditinggikan supaya tidak tenggelam terkena rob. Dalam hal ini Pemerintah Kota Tegal tidak bisa membantu untuk masalah rumah pribadi masyarakat. Dari sisi perilaku, masyarakat harus ikut berpartisipasi dengan cara tidak membuang sampah sembarangan yang bisa membuat tersumbatnya saluran air.

Secara umum tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan penanggulangan rob selama ini tergolong menengah ke atas. Tingginya partisipasi ini dikarenakan obyek yang dibicarakannya merupakan sesuatu yang vital bagi responden, karena menyangkut upaya perbaikan lingkungan dan kelangsungan kehidupannya di masa depan.

Sebagian besar Masyarakat tergolong memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi dalam proses penetapan kebijakan Pemerintah Kota Tegal dalam hal penanggulangan rob. Tingginya partisipasi responden dalam proses penetapan

kebijakan tersebut, dikarenakan responden selaku sasaran program terkena dampak memiliki kepedulian sosial yang tinggi, karena apabila tidak peduli dengan kondisi sekitarnya, dikhawatirkan akan bisa mengganggu kelancaran usaha produksinya sehari-hari, yang umumnya sangat berdekatan dengan alam. Sebagian besar responden memiliki tingkat partisipasi yang sedang dalam proses implementasi kebijakan penanggulangan rob teroglong, yaitu sebanyak 50,52 persen berkategori partisipasi sedang, dan sejumlah 45,26 persen responden lainnya berkategori partisipasi yang tinggi. Tingginya tingkat partisipasi responden dalam proses implementasi ini, dibuktikan dengan tingginya kesediaan untuk menghadiri undang implementasi, tingginya kesediaan untuk membantu, baik dana, tenaga juga konsumsi bagi kelangsungan pembangunan infrastruktur penanggulangan rob. Fenomena ini semakin menegaskan bahwa kultur masyarakat pantai yang agraris yang umumnya terbuka, ternyata di sisi lain juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi apabila menyangkut kepentingan dan keberlangsungan kehidupan sehari-harinya, dengan harapan agar masyarakat bisa hidup secara lebih nyaman, aman dan lebih higienis.

Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses evaluasi dampak kebijakan tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan dengan mayoritas responden sudah sangat memahami lingkungan tempat tinggalnya, maka apabila disuruh melakukan penilaian atau evaluasi atas kebijakan Pemerintah Kota Tegal dalam penanggulangan rob, mayoritas responden mampu merinci dan memverifikasinya secara jelas dan gamblang.

### **C. PENUTUP**

Rob di Kota Tegal merupakan fenomena yang telah terjadi cukup lama. Dalam kaitan tentang rentang waktu kapan mulai terjadinya rob di Kota Tegal. Ketinggian

Rob di Kota Tegal dipengaruhi oleh fluktuasi cuaca seperti misalnya banjir 5 (lima) tahunan dan ada banjir 10 (sepuluh) tahunan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Strategi yang digunakan Pemerintah Kota Tegal dalam penanggulangan rob adalah dengan melibatkan segenap instansi dan elemen terkait masalah rob, yaitu dengan melibatkan SKPD, perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak rob. Keterlibatan segenap unsur dan elemen masyarakat Kota Tegal tersebut meliputi; tahap perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan evaluasi. Sebelum dilakukan penetapan kebijakan penanggulangan rob, kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang dijadikan sasaran program disosialisasikan terlebih dahulu mengenai rencana tahapan-tahapan yang akan dilakukan Pemerintah Kota Tegal terhadap kawasan terkena dampak rob, dengan harapan di samping masyarakat menjadi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif, juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam tahap implementasi nantinya.

Secara umum tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan penanggulangan rob selama ini tergolong tinggi. Tingginya partisipasi ini dikarenakan obyek yang dibicarakannya merupakan sesuatu yang vital bagi responden, karena menyangkut upaya perbaikan lingkungan dan kelangsungan kehidupannya di masa depan.

Sebagian besar Masyarakat tergolong memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi atas dalam proses penetapan kebijakan Pemerintah Kota Tegal dalam hal penanggulangan rob. Tingginya partisipasi responden dalam proses penetapan kebijakan tersebut, dikarenakan responden selaku sasaran program terkena dampak memiliki kepedulian sosial yang tinggi, karena apabila tidak peduli dengan kondisi sekitarnya, dikhawatirkan akan bisa mengganggu kelancaran usaha produksinya

sehari-hari, yang umumnya sangat berdekatan dengan alam. Sebagian besar responden memiliki tingkat partisipasi yang sedang dalam proses implementasi kebijakan penanggulangan rob teroglong, yaitu sebanyak 50,52 persen berkategori partisipasi sedang, dan sejumlah 45,26 persen responden lainnya berkategori partisipasi yang tinggi. Tingginya tingkat partisipasi responden dalam proses implementasi ini, dibuktikan dengan tingginya kesediaan untuk menghadiri undang implementasi, tingginya kesediaan untuk membantu, baik dana, tenaga juga konsumsi bagi kelangsungan pembangunan infrastruktur penanggulangan rob. Fenomena ini semakin menegaskan bahwa kultur masyarakat pantai yang agraris yang umumnya terbuka, ternyata di sisi lain juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi apabila menyangkut kepentingan dan keberlangsungan kehidupan sehari-harinya, dengan harapan agar masyarakat bisa hidup secara lebih nyaman, aman dan lebih higienis.

Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses evaluasi dampak kebijakan tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan dengan mayoritas responden sudah sangat memahami lingkungan tempat tinggalnya, maka apabila disuruh melakukan penilaian atau evaluasi atas kebijakan Pemerintah Kota Tegal dalam penanggulangan rob, mayoritas responden mampu merinci dan memverifikasinya secara jelas dan gamblang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Dunn, William N.2000 (Ed.). *Pengantar Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Gajah Madha University Press

Haris, syamsudin (Ed.).2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press

Hasibolan, Dheyne, Rhein Beresaby dkk.2007. *Politik dan Lingkungan*. Depok: Penerbit Kokoesan

- Muluk, Khairul.2006. *Desentralisasi dan pemerintahan daerah*. Malang: Bayumedia
- Nasution,S.2009. *Metode Penelitian*.Jakarta:Bumi Aksara
- Nugroho, Riant.2007. *Analisis Kebijakan*.Jakarta:Elex Media Komputindo
- Soekanto, Soerjono.1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta:Rajawali Press
- Soemarwoto, Otto.1996. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Sugiyanto dan Robert J. Kodoatie.2002. *Banjir Beberapa Penyebab Dan Metode Pengendaliannya Dalam Prespektif Lingkungan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suyanto,Bagong dan Sutinah.2004. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan (Ed.)*.Jakarta:Kencana
- Tarigan, Robinson.2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Sunyoto. 2002. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winarmo, Budi.2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*.Yogyakarta:Medpress
- Yusuf, Yasin.2005. *Anatomi Banjir Kota Pantai Prespektif Geografi*. Surakarta: Pustaka Cakra

### **Jurnal, artikel**

- Santosa, Edi. *Peluang dan Kendala Demokratisasi Pengelolaan SDA*. hand out disampaikan pada kuliah politik lingkungan, 4 Oktober 2011
- Santosa, Edi. *Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan PSP dan Sistem KelembagaanI*. Hand out disampaikan dalam Seminar Managemen kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kota Semarang. 2007